

# **DINAMIKA KONFLIK PADA PEMBANGUNAN KANTOR DESA YANG MENYERUPAI ISTANA NEGARA**

(Studi Kasus di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)

**Oleh:**

**Drs. Kahar Haerah, M.Si \*, Desriny Lestaria\*\***

\*Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember.

\*\*Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember.

## **Abstrak**

Dibalik pembangunan Kantor Desa yang menyerupai Istana Negara di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember terdapat terjadinya konflik pada masyarakat dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dinamika konflik dan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik pada pembangunan Kantor Desa yang menyerupai Istana Negara serta bagai mana resolusi konflik yang di lakukan oleh Pemerintah Desa dan terdapat dampak positif serta dampak negatif di bangunya Kantor Desa yang menyerupai Istana Negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, sumber data di peroleh data primer dan skunder. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi menggunakan *purposive sampling*. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi pada pembangunan Kantor Desa yang menyerupai Istana Negara disebabkan oleh Proses sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik, Pemerintah Desa kurang transparan terhadap masyarakat mengenai kebijakan dalam pengambilan keputusan, adanya Perbedaan kepentingan antara sesama masyarakat maupun Pemerintah Desa dan Keberpihakan Pemerintah Desa kepada investor dari luar. Dari ke empat faktor penyebab terjadinya konflik yang ada pada Pembangunan Kantor Desa yang menyerupai Istana Negara di Desa Kemuningsari Kidul itu mengakibatkan konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dan antara masyarakat dengan masyarakat.

**Kata Kunci :** *Dinamika Konflik, Pembangunan, Kantor Desa menyerupai Istana Negara*

## Abstract

Behind the construction of the Village Office that resembles the State Palace in Kemuningsari Kidul Village, Jenggawah Subdistrict, Jember Regency, there has been a conflict between the community and the Village Government and the Community. The purpose of this study is to find out how the dynamics of conflict and what factors are behind the conflict in the construction of Village Offices that resemble the State Palace and the ways in which conflict resolution is carried out by the Village Government and there are positive impacts and negative impacts on the establishment of Village Offices that resemble National Palace. The approach used in this research is descriptive qualitative research, data sources in primary and secondary data. Data collection through interviews, observation, and documentation using purposive sampling. Data analysis includes data collection, data reduction, data presentation and data verification. The results showed that the conflict that occurred in the construction of Village Offices that resembled the State Palace was caused by a process of dissemination that did not go well, the Village Government was less transparent to the community regarding policies in decision making, there were differences in interests between the community and the Village Government and the Village Government. to outside investors. Of the four factors that caused the conflict that occurred in the Development of Village Offices that resembled the State Palace in the Village of Kemuningsari Kidul, this resulted in conflicts between the community and the Village Government and between the community and the community.

Keywords: *Dynamics of Conflict, Development, Village Office resembles the State Palace*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan proses mengubah suatu keadaan masyarakat menjadi lebih baik di masa yang akan datang, dengan melibatkan berbagai sumber daya yang ada, guna untuk meningkatkan kualitas hidup. Pembangunan yang bersifat fisik ataupun nonfisik di butuhkan untuk suatu Negara, Daerah dan juga Desa. Adapun pembangunan infrastrukturnya yang berfungsi sebagai roda penggerak laju pertumbuhan ekonomi suatu Daerah dan untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, Sesuai Permendes Nomor 21 tahun 2015, prioritas pertama penggunaan Dana Desa yaitu untuk membangun infrastruktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud. Bidang pemberdayaan seperti kesehatan yang dirikan juga perlu di prioritaskan, diantaranya yaitu Posyandu dan PAUD. Peran Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di tingkat Desa, dan juga memberikan pelayanan yang bagus dan semaksimal kepada masyarakatnya baik itu pelayanan administrasi, pengaduan, pemberdayaan, pembangunan ataupun pembinaan. Tidak hanya pelayan itu saja namun peran Pemerintah juga harus memberikan fasilitas yang layak untuk masyarakat dalam berlangsungnya proses pelayan untuk mawadahi segala aktifitas tersebut tentunya dibutuhkan suatu bangunan yang merupakan Kantor Kepala Pemerintahan tingkat Desa. Dengan demikian Kantor Desa hendaknya di bangun sebagus dan seindah mungkin dengan rancangan yang baik serta pendanaan yang cukup. Mengingat pentingnya fungsi Kantor Desa yang sangat berperan aktif dalam sistem pelayanan masyarakat Desa, maka disetiap Desa memiliki ciri khas yang kusus dalam rancangan pembangunan Kantor Desanya yaitu seperti Kantor Desa yang berada di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang memiliki keunikan tersendiri karena bentuk pembangunan Kantor Desanya yang menyerupai Istana Negara. Dari keunikan tersebut, Kantor Desa Kemuningsari Kidul kini menjadi viral di media sosial dan juga di kalangan warga sekitar baik di Daerah maupun luar Daerah, hampir setiap hari Kantor Desa Kemuning ini ramai di datangi oleh orang baik itu pada saat jam kerja Perangkat Desa pagi, siang dan juga malam mereka sengaja datang ke Kantor Desa hanya untuk berkunjung dan tidak lupa berswafoto di depan Kantor Desa yang menyerupai Istana tersebut.

Umumnya pembangunan selalu menimbulkan dampak yang positif atau negatif. Pembangunan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan-permasalahan sosial yang menjadi tantangan zaman. Setiap kebijakan yang diterapkan pasti akan menimbulkan permasalahan baru. Masalah-masalah yang mendesak dan menanti perpecahan atau resolusi. Pembangunan akan membawa dampak perubahan pada kehidupan dan perubahan itu sendiri merupakan akibat dari terjadinya konflik. Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antara individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan

menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan (Soerjono Suekanto, 2006). Dari uraian di atas di balik pembangunan Kantor Desa yang megah dan juga bagus seperti menyerupai Istana Negara bahkan menghabiskan biayanya sebanyak 1,8 miliar terdapat konflik dalam proses pembangunan tersebut. Pembangunan Kantor Desa menyerupai Istana Negara merupakan program pembangunan dari Pemerintah Desa Kemuningsari itu sendiri, yang mana Pemerintah Desa bersikeras membangun Kantor Desa yang baru yang mirip dengan Istana Negara dari pengambilan keputusan tersebut sebagian dari masyarakat ada yang tidak meyetujui. Dikarenakan menurut masyarakat masih ada kebutuhan yang lebih penting untuk di bangun dan di kembangkan dari pada membangun Kantor Desa yang baru pastinya sangat memakan biaya yang banyak juga, dan Pemerintah Desa tidak transparansi dalam pengambilan keputusan serta tidak transparansi dalam pengalokasian sumber dana yang digunakan. Dari faktor-faktor itulah terjadinya konflik sosial pada masyarakat dengan Pemerintah Desa dan masyarakat dengan masyarakat. Konflik yang terjadi di Desa Kemuningsari Kidul ini menjadi gambaran adanya kepentingan yang di lakukan oleh beberapa pihak kelompok, sehingga terjadi konflik dan dinamika konflik dalam pembangunan Kantor Desa yang baru serta dengan beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik itu sendiri.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Teori Konflik**

Menurut teori konflik Ralf Dahrendorf konflik yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh berbagai aspek sosial bukan hanya persoalan ekonomi saja sebagaimana pandangan Karl Marx (Novri Susan, 2009:49). Latar belakang munculnya pemikiran Lawis. A Coser tentang fungsi konflik sosial dapat dijelaskan dengan melihat kondisi intelektual, sosial dan politik pada saat itu. Kondisi intelektual adalah respon Coster atas dominasi pemikiran Fungsional yang merupakan orientasi teoritis dominasi dalam sosiologi Amerika pada pertengahan tahun 1950. Lawis mulai pendekatan pada nilai konsensus normatif yaitu ketentuan dan keselarasan. Konflik dalam masyarakat terjadi karena ada kekuasaan yang berbeda dalam masyarakat itu sendiri. Terjadinya konflik sosial dapat disebabkan karena berbagai macam sebab. Penyebab konflik menurut Dahrendorf karena adanya ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan sosial yang terjalin (Novri Susan, 2009:49). Esensi kekuasaan Dahrendorf menurut Wallace dan Wolf adalah kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang berkuasa memberikan perintah dan mendapat apa yang diinginkan dari mereka yang tidak berkuasa. Fungsi konflik menurut Dahrendorf adalah menciptakan perubahan dan perkembangan. Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa teori konflik Dahrendorf mengkaji tentang konflik antar kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu yaitu antara pihak di posisi dominan (penguasa) yang berusaha mempertahankan kekuasaan mereka, sedangkan yang berada pada posisi subordinat (rakyat) berusaha melakukan perubahan.

### **2.2. Teori Konflik Kepentingan**

Konflik kepentingan dapat dikatakan sebagai suatu oposisi atau petentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi yang disebabkan oleh adanya berbagai macam perkembangan dan perubahan, serta menimbulkan perbedaan pendapat, konflik kepentingan terjadi oleh adanya berbagai kepentingan dari tiap individu atau kelompok-kelompok yang saling bersinggungan. Teori konflik kepentingan memiliki tiga asumsi utama yang saling berhubungan

1. Manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingannya
2. Kekuatan bukanlah sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata sebagai sumber konflik, melainkan juga sebagai sesuatu yang bersifat memaksa (*coercive*). Sebagian menguasai sumber, sedangkan yang lainnya tidak memperoleh sama sekali
3. Ideologi dan nilai-nilai dipandang sebagai senjata yang dipergunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing.

Berdasarkan tiga asumsi konflik kepentingan tersebut maka penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai berikut :

1. Perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan
2. Langkanya sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas dan posisi
3. Persaingan

Konflik kepentingan akan muncul ketika kebutuhan, nilai dan tujuan saling bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi terbatas dan ketika persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa muncul. Konflik kepentingan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, konflik kepentingan adalah kondisi pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Maurice Deverger mengatakan mitos dan ideologi cenderung memperkuat konflik politik. Hal senada juga dikatakan Geertz, penguatan pengelompokan sosial yang melahirkan ketegangan dan konflik sering disebabkan oleh adanya pengaruh ideology atau ketidaksenangan terhadap nilai-nilai kelompok lain. Adanya sistem stratifikasi sosial yang berubah, serta adanya perjuangan kekuasaan politik yang semakin meningkat secara tajam. Konflik politik dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan ideologi, kuatnya nilai-nilai kelompok, dan keinginan kuat dari Negara lain untuk campur tangan dengan memanfaatkan berbagai kecenderungan yang terjadi di dalam suatu Negara.

### **2.3 Resolusi Konflik**

Resolusi atau penyelesaian konflik tidak bisa terpisahkan dari rekonsiliasi, rekonsiliasi merupakan salah satu tahap resolusi konflik yaitu proses *peace building*. Rekonsiliasi memiliki pengertian perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, perbuatan menyelesaikan perbedaan. Rekonsiliasi merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Ralf Dahrendrof mengatakan penyelesaian konflik yang efektif sangat bergantung pada tiga faktor. *Pertama*, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik diantara mereka. *Kedua*, kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisir sehingga masing-masing pihak memahami tuntutan pihak lain. *Ketiga*, kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dalam hubungan interaksi di antara mereka. Ada tiga cara mengidentifikasi pengendalian konflik, yaitu rekonsiliasi (*rekonsiliation*) usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang berselisih, mediasi (*mediation*) penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah/penasehat, dan perwasitan (*arbitration*) penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang dipilih bersama dan punya kedudukan lebih tinggi. Strategi yang di pandang lebih efektif dalam pengelolaan konflik meliputi:

1. Konsistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuen.
2. Mediasi (perantaraan), jika penyelesaian konflik menemui jalan buntu, masing-masing pihak bisa menunjuk pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak.

Rekonsiliasi konflik pada umumnya dipahami sebagai suatu kerangka teoritik dan praktik yang bertugas tidak saja untuk mengurangi dampak kerusakan yang terjadi akibat konflik, tetapi juga menyelesaikan dan mengakhiri konflik.

### **3. Metodologi penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

### **4. Hasil Penelitian**

#### **A. Dinamika Konflik Yang Terjadi Pada Pembangunan Kantor Desa Yang Menyerupai Istana Negara di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah**

Agar lebih memahami faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik, serta resolusi konflik kasus pembangunan Kantor Desa yang menyerupai Istana Negara di

Desa Kemuningsari Kidul kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang di lakukan oleh Pemerintah Desa dengan masyarakat, terlebih dahulu penulis memaparkan kronologi/dinamika konflik di antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dan konflik antara masyarakat dengan masyarakat. Konflik yang terjadi di tahun 2014 hingga 2016 ini berawal dari kehadiran salah satu pembangunan Kantor Desa yang baru yang dsain pembangunannya menyerupai Istana Negara yang berada di Desa Kemuningsari Kidul, awalnya masyarakat tidak mengetahui maksud dan tujuan dari kegiatan yang di lakukan oleh tim survei dari pihak luar dan juga pihak Pemerintah Desa sendiri. Dari pembangunan Kantor Desa yang baru masyarakat Desa Kemuningsari Kidul pada umumnya belum pernah mendapatkan sosialisasi ataupun penyampaian mengenai akan di dirikannya bangunan Kantor Desa yang baru dari pihak Pemerintah Desa. Sosialisasi hanya dilakukan pada pihak-pihak tertentu saja dan tidak dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat Desa yang lainnya. Setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata pembangunan Kantor Desa yang baru telah di rencanakan oleh Kepala Desa sebelum dia dilantik menjadi Kepala Desa pada tahun sebelumnya dan Kepala Desa juga sudah bekerja sama dengan pihak luar dalam perencanaan, proses hingga mengsucceskan pembangunan Kantor Desa yang baru yang menyerupa Istana Negara tersebut. Persepsi masyarakat yang menduga adanya konspirasi antara Pemerintah Desa dengan pihak luar begitu kuat, karena yang dilakukan persosialisasian atas pembangunan Kantor Desa yang baru yang menyerupai Istana Negara hanya kepada kalangan aparat Desa dan aparat dari pihak luar tanpa ada melibatkan masyarakat Desa pada umumnya. Pengambilan keputusan dan perbedaan kepentingan menjadi permasalahan utama konflik yang terjadi pada pembangunan Kantor Desa yang baru yang menyerupai Istana Negara yang menyebabkan konflik masyarakat dengan Pemerintah Desa dan masyarakat dengan masyarakat.

#### B. Adapun Factor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik

##### 1) Proses sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik

Sosialisasi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, sosialisasi di maksud agar memudahkan seseorang atau sekelompok orang dalam memahami sesuatu hal. Proses sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik dapat mengakibatkan pemahaman atau persepsi orang terhadap suatu hal tersebut akan berbeda-beda. Pemerintah memang pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembangunan Kantor Desa yang menyerupai Istana Negara tersebut, namun sosialisasi yang dilakukan dinilai tidak maksimal serta tidak berjalan dengan baik, karena tidak disampaikan secara menyeluruh keseluruh lapisan masyarakat, sosialisasi dilakukan hanya kepada aparatur-aparatur Pemerintah Desa serta para kerabat atau keluarga dekatnya saja. Selain itu, sosialisasi terkait pembangunan Kantor Desa yang menyerupai Istana Negara tersebut tidak di lakukan pada sejak awal sebelum didirikannya Kantor Desa yang baru.

##### 2) Pemerintah Desa Kurang Transparan Terhadap Masyarakat Mengenai Kebijakan Dalam Pengambilan Keputusan

Tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat secara menyeluruh, mengakibatkan Pemerintah Desa dinilai tidak transparan ataupun terkesan tertutup Terhadap masyarakat, terkait dengan kebijakan-kebijakan perencanaan yang mereka putuskan. Sebagai mana yang telah di ketahui dalam kasus pembangunan Kantor Desa yang baru yang menyerupai Istana Negara ini, Pemerintah Desa langsung saja menetapkan dan mendirikan bangunan tersebut tanpa ada penjelasan secara detail kepada masyarakat mengenai manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat itu sendiri, dalam pengelolaan pembangunan di lakukan oleh pihak Pemerintah Desa atau bekerja sama dengan investor dari luar dan sumber dana yang di gunakan untuk pembangunan Kantor Desa yang megah seperti Istana Negara serta kerugian yang akan di terima oleh masyarakat Desa.

### 3) Perbedaan Kepentingan Antara Sesama Masyarakat Maupun Pemerintah Desa

Banyaknya masyarakat yang berada di Desa Kemuningsari Kidul menjadi gambaran bahwa kepentingan di masing-masing masyarakat maupun pihak dari Perangkat Desa itu berbeda-beda, tidak bersatunya antara Pemerintah Desa dengan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat Desa itu sendiri yang membuat konflik antara sesama menjadi terbuka. Seperti halnya tanggapan masyarakat mengenai Pemerintah Desa hanya berpihak kepada investor dari luar karena Pemerintah Desa pada saat mengambil keputusan dilakukan secara tertutup dan hanya di ketahui oleh kedua belah pihak tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat, sehingga Pemerintah Desa memiliki kepentingan tersendiri di balik di dirikannya bangunan Kantor Desa yang baru yang menyerupai Istana Negara, kemudian keberpihakan salah satu kelompok masyarakat kepada Pemerintah Desa yang menjadi konflik antara sesama masyarakat dengan masyarakat dikarenakan memiliki kepentingan tersendiri dan menguntungkan kelompok tersebut.

### 4) Keberpihakan Pemerintah Desa Kepada Investor Dari Luar

Pemerintah Desa yang seharusnya menjadi mediator dalam mengatasi permasalahan dalam pembangunan Kantor Desa yang baru yang menyerupai Istana Negara kini malah berpihak kepada investor dari luar. Kerja sama yang sudah di jalankan dengan investor dari luar membuat Kepala Desa tidak bisa mengubah keputusannya untuk tidak membangun Kantor yang baru, seharusnya Pemerintah Desa lebih tegas dalam mengambil keputusan sehingga tidak terikat dengan orang ketiga atau investor dari luar yang menjadikan dampak kepada masyarakat Desa Kemuningsari Kidul . Langkah yang di ambil oleh Pemerintah Desa tidak sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat setempat, harapan masyarakat adalah bagaimana Pemerintah Desa bisa transparan dalam mengambil suatu kebijakan dan mengutamakan kepentingan masyarakat, memenuhi kebutuhan dan menjalankan apa yang seharusnya sudah menjadi tugas dan kewajiban dari Pemerintah Desa itu sendiri.



### C. Resolusi Konflik Kasus Pembangunan Kantor Desa Yang Menyerupai Istana Negara di Desa Kemuningsari Kidul Yang di Lakukan Oleh Pemerintah Desa

Pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan diantaranya : Negosiasi, Konsiliasi, Mediasi dan arbitrase (Nasikum 1993).

#### 1). Negosiasi

Dalam pelaksanaan negosiasi yang di lakukan oleh Pemerintah Desa namun tidak menghasilkan titik temu atau kesepakatan bersama masing-masing pihak baik Pemerintah Desa maupun masyarakat, karena masing-masing tetap pada pendiriannya di satu pihak Pemerintah Desa tetap bersikeras akan membangun Kantor Desa yang baru, sedangkan masyarakat tetap menginginkan Pemerintah Desa tidak membangun Kantor Desa yang baru tetapi mengalihkan ke pembangunan yang lain yang lebih di perlukan. Akhirnya negosiasi sebagai resolusi konflik pertama yang dilakukan Pemerintah Desa tidak memberikan hasil yang berarti terhadap penyelesaian konflik yang ada, akibat dari negosiasi tersebut tidak berhasil sebagai mana mestinya kini masyarakat semakin kecewa dengan apa yang sudah di putuskan Pemerintah Desa.

#### 2). Mediasi

proses mediasi dimana melibatkan pihak ketiga yang netral. kapolsek menyampaikan saran maupun usulan kepada kedua belah pihak, namun awalnya Pemerintah Desa tidak mau mendengarkan apa yang di usul oleh kapolsek tersebut dan tetap ingin membangun Kantor Desa yang baru, karena Kepala Desa merasa sudah terlanjur banyak mengeluarkan dana serta sudah bekerja sama dengan investor dari luar. Mediasi terus dilakukan oleh kapolsek dan koramil hingga benar-benar mendapat hasil yang yang di inginkan oleh kedua belah pihak, keputusan demi keputusan sudah di lakukan dan akhirnya mengambil posisi yang sama-sama tidak memberatkan walaupun di satu sisi itu merugikan masyarakat karena apa yang di butuhkan tidak bisa didapatkan, alhasil di sini masyarakatlah yang harus mengalah dan bersabar karena Pemerintah Desa sudah menjanjikan akan segera membenahi apa dibutuhkan oleh masyarakat Desa terkait dengan usulan-usulan yang sudah di sampaikan.

### D. Dampak Dari Pembangunan Kantor Desa Yang Menyerupai Istana Negara di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

#### 1). Dampak Positif

Dampak positif yang diterima oleh masyarakat Desa Kemuningsari Kidul setelah adanya bangunan Kantor Desa yang baru yang menyerupai Istana Negara kini Desa Kemuningsari sudah banyak di ketahui oleh kalangan dari luar dan menjadi Desa yang sering di kunjungi oleh masyarakat dari luar maupun dalam Daerah sendiri karena Kantor Desanya yang unik membuat masyarakat penasaran dan ingin berswafoto di dapan bangunan yang menyerupai Istana Negara tersebut. Dari segi bidang ekonomi masyarakat di sekitar Kantor Desa Kemuningsari Kidul mengalami peningkatan karena terbukanya lapangan pekerjaan dengan berjualan di sekitar Kantor Desa.

## 2). Dampak Negatif

Dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pembangunan Kantor Desa yang menyerupai Istana Negara yaitu terjadi konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dan masyarakat dengan masyarakat. Perubahan sosial juga terjadi yaitu perubahan sosial pada masyarakat diakibatkan karena pengunjung yang berdatangan ke Kantor Desa tidak ada etika sopan santun dalam berkunjung terutama itu pada anak-anak dan remaja mereka bersikap seolah-olah tidak ada batasan antara lawan jenis. Kelakutan pengunjung remaja tersebut juga dilakukan pada saat jam kerja Pemerintah Desa. Bukan hanya perubahan sosial itu saja namun kriminal juga terjadi di Desa Kemuningsari Kidul setelah berdirinya bangunan Kantor Desa yang baru yaitu terjadinya begal dan pencopetan di sekitar jalan yang menuju Kantor Desa bahkan di depan Kantor Desa tepatnya di jalan juga pernah terjadi.

## Kesimpulan

Dari dinamika pembangunan Kantor Desa yang menyerupai Istana Negara di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ini ternyata terdapat konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dan antara masyarakat dengan masyarakat. Faktor penyebab terjadinya konflik tersebut diantara yaitu : Proses sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik, Pemerintah Desa kurang transparan terhadap masyarakat mengenai kebijakan dalam pengambilan keputusan, Perbedaan kepentingan antara sesama masyarakat maupun Pemerintah Desa, Keberpihakan Pemerintah Desa kepada investor dari luar. Adapun resolusi konflik yang dilakukan yaitu negosiasi dan mediasi. Dan terdapat Dampak positif dan negatif dari pembangunan Kantor Desa yang menyerupai Istana Negara.

## Daftar Fustaka

Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik;Teori, Aplikasi dan Penelitian*,

Salemba Humanika, Jakarta, 2010.

Rauf, Maswadi, *Konsensus Politik Sebuah Penjajakan Politik*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2000.

Winardi, *Manajemen Konflik, (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)*,

Cet. Ke-2 Jilid 2, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Soetopo (1999). *Teori Konflik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Maurice Deverger, *Sosiologi Politik*,(Jakarta;Yayasan Ilmu Sosial,1996)Hal.156

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana,  
Jakarta, 2010.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan*, Gramedia,  
Jakarta, 1982.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Presisen Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Bangunan  
Gedung Negara (BGN).

Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 45/PRT/2007 Tentang Pedoman Teknis  
Pembangunan Gedung Negara.

oetopo (1999). *Teori Konflik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

